

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu (*Preview Research*) yang Relevan

Dalam mengkaji konflik yang terjadi antara Inggris dan Rusia sebagai dampak atas serangan Rusia ke Ukraina, peneliti telah melakukan berbagai *preview research* yang relevan melalui *study literature* untuk memperkaya hasil penelitian, antara lain yaitu pertama karya tulis ilmiah antara lain tulisan berjudul Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina ditulis Syuryansyah dan Rethorika Berthanila (2022). Pertimbangan penulis menjadikan tulisan ini karena kedua peneliti membahas mengenai alternatif resolusi konflik dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina. Adapun perbedaannya yakni, kedua peneliti lebih menitikberatkan metode atau cara penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui jalur diplomatik dan penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga peradilan, arbitrase, dan organisasi internasional lainnya, yakni perundingan (*negotiation*), penyelidikan (*enquiry*), jasa-jasa Baik (*good office*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), arbitrase, pengadilan Internasional. Selain itu cara lainnya adalah menyerahkan kepada badan-badan (organisasi) dan pengaturan Regional, dan cara-cara damai lainnya berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Keempat alternatif ini ditawarkan karena berdasarkan pencermatan kedua penulis tersebut, kemungkinan jalan damai di antara pihak yang berkonflik masih terbuka lebar. Masih menurut Syuryansyah dan Rethorika Berthanila, di antara keempat alternatif resolusi konflik, negosiasi merupakan strategi tepat untuk dilakukan oleh kedua negara sehingga kedua negara yang berkonflik dapat mengawasi prosedur penyelesaian konflik berdasarkan kesepakatan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik.

Kedua, karya tulis Adib Izzuddin, Rossi Indra Kurniawan, dan Hastian Akbar Stiarso dengan judul *Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*,(2022). Pertimbangan penulis menjadikan tulisan Adib Izzudin dan kawan-kawan karena terdapat kesamaan pandangan dengan penulis yakni perlunya upaya Resolusi konflik Rusia-Ukraina dari sisi peace. Meski demikian, terdapat perbedaan antara pendekatan penulis dengan mereka. Adapun perbedaanya, ketiga penulis tersebut menawarkan opsi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui penerapan konsep perdamaian yang dikemukakan oleh Johan Galtung dengan menggunakan metode *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building* sebagai resolusi konflik. Menurut mereka, model analisis analogi bawang bombay dalam konsep Galtung juga dapat digunakan dalam membantu melihat posisi, kepentingan dan kebutuhan masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik. Adib dkk. berpendapat bahwa penyelesaian konflik Ukraina harus diupayakan untuk diselesaikan untuk menggunakan metode litigasi dan nonlitigasi, karena resolusi konflik melalui koersif cenderung kurang efektif.

Studi terdahulu, ketiga yang dialami penulis dalam memperkaya bahan bacaan dalam pembuatan karya tulis skripsi ini adalah jurnal berjudul *Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe* yang ditulis oleh Ruth Endam dan Divine Forcha Wasum dan dipublikasikan melalui. Penulis menggunakan tulisan dalam jurnal yang diterbitkan dalam jurnal ini Advance in Social Science Research Journal (2022) karena melihat adanya urgensi yang sama dengan kacamata penulis tentang pentingnya upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina karena dampak yang ditimbulkannya baik secara geopolitik maupun global. Namun demikian terdapat perbedaan pembahasan antara penulis dengan Endam dan Wasum,

keduanya lebih menitikberatkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina di bidang ekonomi yang dialami Rusia bahkan juga secara global. Ini adalah krisis dengan konsekuensi global, dan membutuhkan perhatian global dan tindakan nyata sebagai Resolusi Konflik. Dalam tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal tersebut, kedua peneliti mengutip pernyataan resmi Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken bahwa konflik Rusia dan Ukraina lebih besar dari konflik antara dua negara bahkan lebih besar daripada Rusia dan NATO.

Keempat adalah tulisan berjudul *Pendekatan Diplomasi Ekonomi dalam Konflik Rusia-Ukraina* yang ditulis oleh Randy Bion Bramastya dan Ranita Rompa Batan dalam Jurnal Sosial Politik Integratif (SPI) Vol. II, 2022. Sesuai judulnya, penulis memiliki alasan dalam menjadikan tulisan tersebut sebagai *previous study*, selain relevan dengan topik yang disusun penulis dalam skripsi ini, tulisan tersebut juga memberikan insight atau pemahaman bagi penulis mengenai penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dengan menggunakan *soft diplomacy*. Hal ini yang kemudian menjadi perbedaan antara sudut pandang penulis dengan Endang dan Wasum, karena dalam tulisan tersebut kedua penulis membahas diplomasi ekonomi yang dilakukan Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara maju tersebut sepakat untuk melakukan semua yang dapat dilakukan guna menghentikan perang demi menjamin perdamaian. Salah satunya adalah menggunakan ekonomi. Menurut penelitian kedua penulis, menggunakan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional adalah esensi utama dari Diplomasi Ekonomi. Kedua penulis juga mengambil referensi dari *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* yang ditulis Bayne, N., & Woolcock, S. (2017) dalam penerapan instrumen Diplomasi Ekonomi yang menggunakan embargo,

sanksi ekonomi, isolasi ekonomi, stimulus ekonomi, utang luar negeri, dan lainnya.

Lebih lanjut dalam pandangan Randy Bion Bramastya dan Ranita Rompa Batan, konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, pengurangan konsumsi rumah tangga, karena harga yang lebih tinggi (minyak, gas, gandum, mineral), gangguan rantai pasokan, ketidakpastian, hambatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan investasi secara global dan di Eropa khususnya karena kedua negara merupakan eksportir yang signifikan bagi Eropa. Oleh karena itu, menurut mereka penting bagi pembuat kebijakan di negara-negara yang secara signifikan mengandalkan impor komoditas vital dari Rusia tersebut untuk memulai negosiasi cara-cara alternatif sebagai antisipasi jika Rusia benar-benar memutuskan untuk menghukum Barat melalui pembatasan ekspor. Namun demikian, studi tersebut juga terbatas pada dampak ekonomi dari perang Rusia- Ukraina di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa. Selanjutnya penelitian lebih berfokus pada dampak politik atau sosial budaya dari krisis ini.

Studi terdahulu kelima adalah tulisan berjudul *Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power* yang ditulis oleh Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi yang dipublikasikan dalam *Jurnal Political Issue (JPI)* pada 2023. Menurut hemat penulis tulisan kedua sarjana Hubungan Internasional ini relevan dengan tema penelitian skripsi ini yaitu membahas tentang resolusi konflik, selain menarik dan membuka wawasan penulis bahwa ternyata Indonesia tidak tinggal diam untuk turut berkontribusi secara bebas aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Meski tentu saja terdapat perbedaan antara topik pembahasan penulis dengan Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila karena keduanya lebih membahas mengenai upaya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo yang berinisiatif melakukan misi perdamaian dengan

melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia. Inisiatif itu dilakukan dengan misi untuk menjadi jembatan komunikasi kedua negara yang tengah berkonflik.

Pembahasan penelitian berfokus pada instrumen diplomasi *first track* yang digunakan Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian konflik Rusia-Ukraina melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama antar negara, sehingga membuka peluang perdamaian antar negara. Selain itu, dibalik misi perdamaian tersebut, kedua penstudi HI tersebut, Indonesia sebagai presidensi KTT G20 memiliki kepentingan ekonomi dan membentuk citra positif. Fenomena tersebut kemudian bersesuaian dengan tujuan dari *soft power* Indonesia yaitu untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik dengan menggunakan *soft resource* sebagai ketua sekaligus penyelenggara KTT G20.

Namun dari berbagai kajian terdahulu di atas, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap Diplomasi Koersif yang dilakukan Inggris sebagai bagian dari upaya resolusi konflik Rusia-Ukraina, karena hal ini yang menurut hemat penulis paling menonjol selain terjadi *gap research* dimana belum ada penelitian sebelumnya yang mengambil topik Diplomasi Koersif Inggris terhadap Rusia secara khusus pada masa pemerintahan Boris Johnson. Pada penelitian skripsi ini, penulis mencoba menawarkan analisis baru dengan menjabarkan tentang kebijakan politik luar negeri Inggris di bawah kepemimpinan Boris Johnson hingga akhir masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Rusia yang berakhir dengan kegagalan dan berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Inggris dan Rusia.

## 2.2 Kerangka Teori dan Konsep

### 2.2.1 Diplomasi Koersif

Dalam menjaga kestabilan dan perdamaian dunia internasional, diplomasi merupakan instrumen penting bagi setiap negara ketika berinteraksi dengan negara atau kelompok lain, meski terkadang jalan yang harus ditempuh kerap menemui kesulitan, seakan tidak ada jalan keluar, stagnan atau bahkan *deadlock*. Diplomasi, tetaplah sebuah taktik yang diyakini lebih efektif dan efisien untuk menjadi Resolusi Konflik dibandingkan dengan perang yang merugikan negara yang diserang, tetapi juga negara yang melakukan penyerangan. Dalam prosesnya, diplomasi damai memang tidak selalu mudah, hal itu karena karena bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional *national interest* masing-masing negara yang ingin diperjuangkan. Ketika diplomasi dengan cara damai tidak berhasil sebagai upaya resolusi konflik, maka disinilah peran diplomasi dengan tekanan atau penggunaan kekuatan dalam skala terbatas seperti yang tertuang dalam konsep Diplomasi Koersif<sup>11</sup> dijalankan.

Menurut hemat penulis, Diplomasi Koersif paling menarik di antara sekian banyak jenis diplomasi yang kerap dipraktikkan dalam interaksi antar negara di dalam dunia hubungan internasional. Mengapa? karena dengan menjalankan Diplomasi Koersif, maka suatu negara telah merealisasikan esensi seni diplomasi untuk mencapai tujuan kepentingan nasionalnya tanpa perang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 piagam PBB bahwa semua negara anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional yang mereka hadapi dengan cara damai semaksimal mungkin, sehingga

---

<sup>11</sup> Alexander L. George dalam Jack S. Levy. 2008, Journal : Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander L. George, Political Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008, hlm. 53

perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Diplomasi Koersif disertai tekanan dilakukan dengan tujuan agar negara lawan membatalkan atau menghentikan aksinya sebagaimana dikemukakan oleh George L. Alexander.

Jika, umumnya diplomasi sering diasumsikan sebagai suatu proses yang cenderung damai dan kooperatif tidak demikian halnya dengan Diplomasi Koersif yang justru identik dengan ancaman, paksaan, atau bahkan kekerasan.<sup>12</sup> Meskipun menggunakan kekerasan, namun cara untuk menaklukkan musuh dalam konsep Diplomasi Koersif tetap dalam skala terbatas.<sup>13</sup> Sifatnya yang mengandung paksaan dan ancaman, menjadikan Diplomasi Koersif sering ditempatkan pada akhir spektrum yang berbeda karena cukup kontradiktif.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, terdapat dua pihak yakni negara pengancam dan yang diancam atau negara pengirim dan negara target, atau disebut juga negara subjek dan objek. Diplomasi Koersif pada umumnya dilakukan oleh suatu negara atau kelompok negara yang memiliki *power* dan *power* tersebut memiliki pengaruh ke negara lain. *Power* yang digunakan sebagai pendukung tindakan Diplomasi Koersif bertujuan agar kepentingan pengancam dapat mencapai kepentingannya dari negara yang diancam. Namun demikian, *power* yang digunakan suatu negara dalam menjalankan praktik Diplomasi Koersif tidak selalu dalam bentuk kekuatan militer, tetapi dapat juga bisa dalam bentuk pengaruh ekonomi, politik, dan lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Rahim, Halil Muhammad. 2019. Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran <file:///Users/yaomi/Downloads/42-Article%20Text-247-1-10-20190628.pdf>

<sup>13</sup> George dalam Byman, D.L. and Waxman, M.C. (2002) *The Dynamics of Coercion: American Foreign Policy and the Limits of Military Might*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>14</sup> A Amin, N Wahida, M Mumin.. Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundur Dari Joint Comprehensive Plan Of Action (Jcpoa) Tahun 2018. *jurnal Hukum Unsulbar* 6 (1), 7-16

<sup>15</sup> Budiarjo Budiarjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peu Ghosh mengemukakan, sebagai sebuah fenomena sosial, diplomasi merupakan peradaban manusia yang sudah sangat tua, bahkan sebagai instrumen politik diplomasi sudah dapat ditemukan di era kuno (Yunani, China, Bizantium, dan Romawi) pada 500 SM yang dalam perjalanannya sangat mempengaruhi diplomasi di era modern.<sup>16</sup> Diplomasi memiliki berbagai jenis di antaranya *Coercive Diplomacy* atau yang lebih dikenal dengan Diplomasi Koersif. Diplomasi Koersif didefinisikan sebagai upaya pemaksaan (*coercion*) yang dilakukan oleh suatu negara melalui ancaman dalam bentuk penggunaan kekerasan (*use of force*) atau sanksi, dengan tujuan untuk mengubah perilaku negara target.<sup>17</sup> Secara umum, Diplomasi Koersif dikenal sebagai pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara melalui ancaman, sanksi bahkan dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki suatu negara, hal itu bertujuan untuk mengubah sikap negara yang bersangkutan. Namun demikian, secara teori kekuatan yang digunakan tidak dalam posisi kekuatan penuh *limited use of force* atau penggunaan skala kekuatan terbatas untuk menghentikan atau membatalkan tindakan pihak lain yang dianggap mengancam.<sup>18</sup>

Menurut perkembangan *literature*, konsep Diplomasi Koersif lahir dan berkembang bermula dari kebijakan Amerika Serikat ketika melakukan kontrol dengan menggunakan tekanan *use of force* ketika Presiden John F Kennedy memimpin Amerika Serikat.<sup>19</sup> Diplomasi Koersif pernah beberapa kali dilakukan oleh AS di antaranya dan paling populer dalam kajian praktik Diplomasi Koersif adalah penerapan Diplomasi

---

<sup>16</sup> Umar Surjadi Bakri (2019). Dasar-dasar Hubungan Internasional. Jakarta. Hal.159

<sup>17</sup> Barston, R.P. (2013). Modern Diplomacy Edition 4th Published 2013. London. Routledge. Hal. 48

<sup>18</sup> George, Alexander L and William E. Simons, David K. Hall (1994). The Limits of Coercive Diplomacy Second Edition. San Francisco and Oxford: Westview Press, Boulder

<sup>19</sup> Prasetyo Pangestu Nugroho. 2018. Kesuksesan Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama 2008-2015. Page 19 diakses melalui link <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164491/1/Prasetyo%20Pangestu%20Nugroho.pdf>



Koersif yang berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba pada 1962 yang kemudian menjadi titik berangkat munculnya kajian Diplomasi Koersif dan berlanjut hingga sekarang. Konsep Diplomasi Koersif pertama kali dikemukakan oleh Alexander L. George, seorang profesor di Universitas Stanford dalam buku yang berjudul *The Limits of Coercive Diplomacy 1971*. Buku ini secara umum membahas Diplomasi Koersif sebagai salah satu instrumen yang digunakan suatu negara di mana didalamnya terdapat ancaman, persuasi, bujukan positif, dan akomodasi terintegrasi ke dalam suatu strategi tawar-menawar dalam krisis sehingga menjadi instrumen alternatif bagi elit politik selain perang dan strategi militer.

Setelah meluncurkan buku pertamanya pada 1971, buku dengan topik yang sama dirilis oleh George dalam beberapa seri berikutnya. Jika sebelumnya hanya membahas tiga studi kasus asli dari upaya AS untuk menggunakan Diplomasi Koersif di Kuba, Laos dan Vietnam, pada 1991 buku pertama George sebagai buku utama kajian Diplomasi Koersif telah direvisi berdasarkan temuan baru yaitu studi kasus Pearl Harbor, Nikaragua, Libya, dan krisis perang Telu. Penambahan itu dilakukan George sebagai untuk memberikan keluasan dan bobot analisis. Doktrin ini disebut juga sebagai *flexible and controlled response* yang dapat menjelaskan variasi tingkatan *use of force* diproporsikan dengan ancaman, sehingga setiap ancaman atau krisis akan direspons dengan skala yang berbeda oleh suatu negara.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nugroho, Prasetyo Pangestu (2018) *Kesuksesan Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Barrack Obama (2008-2015)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Hal.16

Diplomasi Koersif merupakan salah satu dari sekian banyak jenis diplomasi yang masih terus eksis hingga saat ini. Karakternya yang bersifat memaksa memiliki tujuan agar negara lawan terpengaruh sehingga melakukan penghentian aksi. Seperti hanya kajian peneliti dalam mencermati Diplomasi Koersif yang dipraktikkan Inggris bersama sekutunya melalui NATO terhadap Rusia dalam upaya resolusi konflik Rusia-Ukraina. Diplomasi Koersif dilakukan negara super *power* yang menggunakan sarana ancaman ke negara lain agar pihak lawan mau menuruti permintaan negara yang memberi ancaman. Kepatuhan negara lawan bisa berupa penundaan atau pembatalan tindakan di pihak lawan. Dalam perkembangannya, selain AS praktik Diplomasi Koersif juga diterapkan negara-negara lainnya seperti Arab Saudi terhadap Qatar dan tentu saja Inggris terhadap Rusia yang tengah didalami oleh penulis melalui skripsi ini.

Sebelum dipopulerkan oleh Alexander L. George pada 1971, konsep diplomasi kekerasan '*diplomacy of violence*' telah diperkenalkan lebih dulu oleh Thomas C. Schelling dalam bukunya "Arms and Influence" pada tahun 1966 terutama melalui konsep paksaan yang dinamai sebagai *Compellence*. Menurut Schelling, sebagai cikal-bakal Diplomasi Koersif, *compellence* (kepatuhan) adalah strategi pemaksaan dengan bentuk ancaman yang dilakukan dengan kekerasan atau kekerasan secara terbatas namun efisien, guna meningkatkan kredibilitas ancaman itu sendiri. George sendiri menyatakan, kalau istilah *compellence* yang digunakan Schelling seringkali mencakup diplomasi koersif dan pemerasan bahkan kadang-kadang juga pencegahan.

Menurut George ada dua alasan mengapa, dirinya tidak menggunakan istilah *compellence* atau paksaan. Pertama, konsep Diplomasi Koersif dapat membedakan antara penggunaan ancaman koersif yang *defensif* dan *ofensif*; sedangkan pemaksaan tidak.

Kedua, konsep *compellance* menyiratkan ketergantungan eksklusif atau berat pada ancaman koersif, sedangkan George ingin menekankan kemungkinan diplomasi yang lebih fleksibel yang dapat menggunakan persuasi dan akomodasi yang rasional serta ancaman koersif untuk mendorong musuh, baik untuk mematuhi tuntutan atau untuk melatih kompromi yang dapat diterima. Sebagai bentuk elaborasi dari konsep *compellence* Schelling, George mengembangkan sebuah kerangka konseptual baru yang lebih sistematis yakni Diplomasi Koersif.<sup>21</sup> Terdapat tiga karakteristik mencirikan Diplomasi Koersif menurut George: 1) permintaan; 2) ancaman; dan 3) tekanan waktu. Berikut penjelasan singkat untuk setiap karakteristik tersebut:

- a. **Permintaan:** Diplomasi koersif melibatkan tuntutan atau permintaan yang sangat spesifik dan tidak dapat ditawar-tawar. Permintaan ini harus jelas dan terperinci, agar tidak terjadi kebingungan atau manipulasi dalam proses negosiasi. Permintaan yang jelas juga membantu dalam mempertahankan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Dengan kata lain, tidak boleh ada standar ganda dalam tuntutan atau permintaan. Permintaan atau permintaan tersebut dianggap salah dan tidak kredibel. Dalam hal ini, kemungkinan negara target akan memenuhi permintaan tersebut rendah.
- b. **Ancaman:** Diplomasi Koersif melibatkan ancaman yang diberikan sebagai respons terhadap permintaan yang tidak dipenuhi atau tindakan yang tidak diinginkan dari pihak lain. Ancaman ini dapat berupa sanksi ekonomi, tindakan militer atau tindakan lain yang dapat memberi tekanan pada pihak

---

<sup>21</sup> Jakobsen, Peter Viggo. (2020). *Diplomacy Coercive as Crisis Management*, Oxford University Press  
Jakobsen (1998). Hal.8

yang ditargetkan. Ancaman tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku pihak yang ditargetkan dan membuat mereka mematuhi permintaan yang diajukan.

- c. ***Time pressure* atau batas waktu:** Diplomasi koersif mengandalkan tekanan waktu yang ketat untuk mencapai tujuannya. *Time pressure* diberikan sebagai pendekatan untuk mempercepat proses negosiasi dan pengambilan keputusan. Tekanan waktu tersebut dapat menciptakan ketidakpastian, memaksa pihak lain untuk merespons dengan cepat, dan mengurangi ruang untuk taktik terus-menerus. Dengan membatasi waktu yang tersedia, Diplomasi Koersif dapat meningkatkan tekanan pada pihak yang ditargetkan untuk lebih cepat bertindak.

Karakteristik-karakteristik ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas Diplomasi Koersif dan membuat pihak yang ditargetkan mematuhi tuntutan yang diajukan. Namun, situasi diplomasi memiliki dinamika yang unik, dan tidak semua karakteristik ini harus selalu ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sejak penelitian Schelling dan George berbagai sarjana telah mengeksplorasi keberhasilannya *compellance* dan Diplomasi Koersif *Coercive Diplomacy*. Mereka antara lain Tom Sauer dalam artikelnya yang sangat populer berjudul: *Coercive Diplomacy by the EU: The Case of Iran*” (2007). Ilario Schettino dengan tulisannya berjudul *Is Coercive Diplomacy a Viable Means to Achieve Political Objectives?* (29 Juni 2009). Peter Viggo Jakobsen melalui tulisannya *Diplomacy Coercive as Crisis Management*, Jack S. Levy dalam *Deterrence and Coercive Diplomacy : The Contribution of Alexander L.*

*George* (2008). Jentleson, BW melalui tulisannya *The Reagan Administration*

*Versus Nicaragua: The Limits of 'Type C' Coercive Diplomacy*” (1994) dan *Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World*. Stanley (2006), sedangkan para sarjana Indonesia yang mengkaji topik Diplomasi Koersif antara lain Muhammad Halil Rahim dalam tulisannya berjudul *Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran* (2019), Nur Wahida dkk berjudul *Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundur Dari Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Tahun 2018*, serta lainnya.

Dari kajian para sarjana dapat diketahui bahwa pendekatan Diplomasi Koersif yang digunakan untuk mempengaruhi negara lain melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Tujuan utama diplomasi koersif adalah untuk mempengaruhi negara target agar mengubah perilakunya sesuai dengan keinginan negara yang menggunakannya. Diplomasi Koersif seperti dikemukakan George harus digunakan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Penggunaannya harus sejalan dengan norma-norma internasional dan tujuan yang melekat pada diplomasi sebagai alat untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Bahkan ditegaskan George dalam tulisannya berjudul *The Limits of Coercive Diplomacy Edisi Kedua* (1994 hal.7) bahwa dalam strategi yang dilakukan negara pengirim ditujukan sebagai bentuk pertahanan dan dalam skala terbatas agar negara lawan menghentikan atau membalikkan aksinya. Kekuatan penuh yang bersifat menyerang, menurutnya bukan sebuah diplomasi koersif tetapi lebih layak disebut strategi pemerasan. Diplomasi dilakukan dengan cara yang mengedepankan cara tekanan yang terukur bukan kekerasan apalagi pemerasan.

Menurut George, Diplomasi Koersif memiliki dua objektif utama yaitu untuk menghentikan *to stop* atau untuk membatalkan *to undo* tindakan-tindakan berbahaya yang

telah dilakukan oleh negara target.<sup>22</sup> Diplomasi Koersif dalam pandangan George merupakan penggunaan ancaman dengan kekuatan terbatas untuk memaksa musuh menghentikan atau menunda tindakannya. Dalam penerapannya, strategi Diplomasi Koersif versi George dalam Jakobsen<sup>23</sup> melibatkan empat variabel yang terdiri dari permintaan, wadah atau mekanisme untuk menciptakan rasa urgensi terhadap permintaan seperti batas waktu, ancaman atau hukuman untuk ketidakpatuhan, dan penggunaan insentif. Dalam literatur Hubungan Internasional, Diplomasi Koersif pada intinya memiliki dua karakteristik: pertama, dimaksudkan untuk mengubah perilaku target; dan kedua, ia melakukannya termasuk dengan rasa sakit yang mengancam tetapi tidak harus menggunakan kekerasan) dalam jumlah terbatas.<sup>24</sup>

Berbasis berdasarkan Konsep Diplomasi Koersif yang dipelopori oleh George Alexander, Tom Sauer<sup>25</sup> mengidentifikasi 10 faktor yang dapat menentukan efektivitas strategi diplomasi koersif melalui sanksi yaitu (1) permintaan yang sah tujuan dasar yang sah tujuan dasar yang sah (*legitimate underlying objective*), permintaan yang sah (*legitimate demand*), tidak takut akan terjadinya kekeliruan (*no fear of a 'slippery slope'*)<sup>26</sup>, ancaman (*proportional threat*), ancaman yang didukung oleh opini publik (*threat supported by public opinion*), ketakutan akan eskalasi (*fear of escalation*) reputasi

---

<sup>22</sup> Constantinou. (2016). Constantinou, C., Kerr, P., & Sharp, P. (2016). The SAGE handbook of diplomacy. London: SAGE Publication. Hal. 478

<sup>23</sup> Jakobsen, Peter Viggo. (2020). Diplomasi Koersif sebagai Manajemen Krisis. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1624>

<sup>24</sup> Robert Art and Patrick Cronin, The United States and Coercive Diplomacy, US InstitutePeace Press, Washington DC, 2003, pp. 402-405.

<sup>25</sup> Tom Sauer adalah profesor politik internasional di Universitas Antwerpen di Belgia. Aktif menulis dan pernah menerima berbagai penghargaan salah satunya Rotary International Alumni Global Service Award pada 2019.

<sup>26</sup> Opcit, Sauer T, 2027, hal. 18

(reputation), tekanan waktu yang kredibel (*credible time pressure*), motivasi mutlak (absolute motivation), dan motivasi relatif (relative motivation).<sup>27</sup>

Dalam operasionalisasinya, *Hypothesis of Coercive Discretion* sebagai ajakan, bahaya, batas waktu, dan inspirasi dari negara pengirim berdampak pada negara tujuan. Dari efek samping sebagai pengaturan homegrown dari negara tujuan, diolah menjadi hasil strategi internasional dimana negara tujuan dapat memutuskan untuk mendukung atau menolak diskresi koersif yang diiklankan. Secara keseluruhan, hasil dari strategi koersif apakah berhasil atau gagal dipengaruhi oleh aktivitas negara tujuan yang memutuskan untuk mematuhi atau mengabaikan diskresi. Berbagai faktor ini akan menentukan metodologi koersif mana yang akan diambil suatu negara, apakah itu ultimatum, ultimatum implisit, pendekatan *try and see* atau pendekatan insentif *carrot and stick*.<sup>28</sup>

Dengan memaparkan definisi dan konsep Diplomasi Koersif di atas dapat dikatakan bahwa Diplomasi Koersif merupakan satu dari sekian banyak jenis diplomasi yang digunakan sebagai instrumen kebijakan politik luar negeri suatu negara. Karakter khas dari tipe diplomasi ini adalah bersifat memaksa sehingga mengakibatkan negara lawan terpengaruh dan pada akhirnya melakukan pembatalan atau penghentian aksi. Oleh karena itu, berdasarkan topik penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, peneliti menggunakan gabungan pemikiran Alexander L. George sebagai pelopor kajian Diplomasi Koersif dan para sarjana lainnya yang menggali lebih dinamis pemikiran George. Dengan menggunakan latar belakang teori Diplomasi Koersif, skripsi ini ingin menjelaskan bagaimana Diplomasi Koersif Inggris terhadap Rusia sebagai upaya resolusi konflik.

---

<sup>27</sup> ibid

<sup>28</sup> ibid

## 2.2.2 Resolusi Konflik

Untuk mendalami tentang Diplomasi Koersif yang dilakukan oleh Inggris pada masa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson sebagai resolusi konflik Rusia-Ukraina, tentunya harus terlebih dahulu kita memahami konsep tentang Resolusi konflik itu sendiri. Resolusi konflik dilakukan dengan cara baik dilakukan secara mandiri oleh pihak yang berkonflik atau melibatkan pihak ketiga yang lebih netral. Dalam konteks resolusi konflik Rusia-Ukraina, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Diplomasi Koersif Inggris terhadap Rusia bertujuan untuk mendorong Rusia untuk menghentikan agresi dan mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi atas konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina yang berdampak luas terhadap negara-negara di benua Eropa tak terkecuali Inggris. Resolusi konflik *conflict resolution* sebagaimana dikemukakan oleh Burton (1990;295) adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Menurutnya, terdapat perbedaan antara Resolusi Konflik sebagai perlakuan *treatment* terhadap persoalan akar konflik dengan resolusi konflik sebagai penanganan *seatlement* konflik dengan cara-cara paksa *coercion* atau dengan cara tawar-menawar *bargaining* atau perundingan *negotiation*. Dalam kasus konflik Rusia dengan Ukraina, terdapat tiga faktor yang jadi pemicu serangan militer Rusia ke Ukraina yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politik. Ukraina merupakan *buffer-zone* bagi NATO dalam *meng-counter* Rusia sehingga menempatkan posisi Ukraina tersebut strategis secara geopolitik untuk saling berebut pengaruh ideologis maupun teritorial.<sup>29</sup>

---

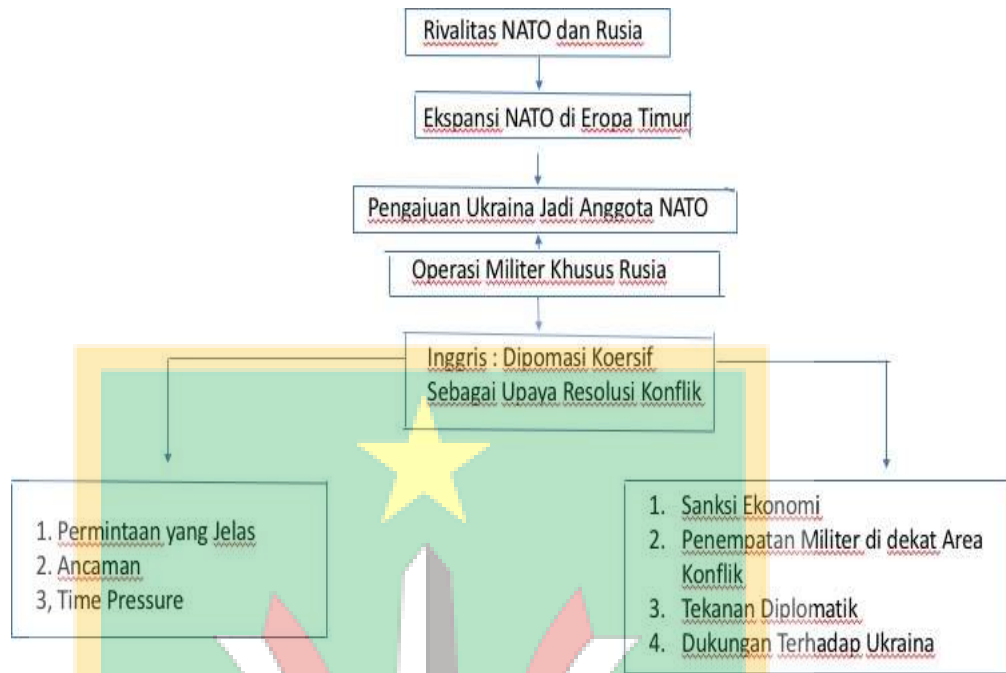
<sup>29</sup> Syuryansah Syuriyansyah dan Rethorika Berthanila. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Rusia- Ukraina. Jurnal: PIR.Vol.7 No.1, 2022,hal.1 <https://mail.e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/1664/2077>



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Setiap negara pada dasarnya menginginkan terciptanya perdamaian namun, sistem politik internasional yang bersifat anarkis sebagaimana pandangan para realis kerap menempatkan para aktor hubungan internasional dalam posisi komepitisi berujung konflik. Oleh karena itu mereka membutuhkan kerja sama, aliansi bahkan lebih erat sebagai sekutu dengan negara lain, atau sebaliknya menjadi rival bahkan menjadi musuh. Diplomasi memiliki peran yang sangat beragam dan banyak berperan dalam hubungan internasional. Di sinilah perlunya berbagai upaya dilakukan untuk menemukan jalan keluar dan diplomasi adalah cara-cara yang umum dilakukan sebagai resolusi konflik. Pentingnya diplomasi sebagai penjaga keseimbangan dan perdamaian tatanan internasional semakin meningkat di dunia modern ini. Bahkan seperti dikutip dari tulisan oleh Harun Umar dan Irma Indrayani berjudul *Foreign And Domestic Policy, Diplomacy And Cooperation, International Political* (2020) bahwa diplomasi selalu berperan besar dalam mengatur kebijakan internasional. Menurut keduanya, banyak masalah internasional dapat diselesaikan melalui diplomasi. Dalam hubungan internasional terdapat dua kategori diplomasi, pertama *soft diplomacy* yang biasanya dilakukan melalui seni, budaya, dan perdagangan, sedangkan *hard diplomacy* dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer maupun yang bersifat tekanan lainnya.

Meski dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki *power* dan termasuk negara yang melakukan pengayaan nuklir, Inggris bersama-sama dengan negara anggota NATO belum menggunakan kekuatan sepenuhnya dalam membantu Ukraina. Dalam menganalisa Diplomasi Koersif yang diambil Inggris dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dengan Ukraina, penulis menggunakan kerangka konseptual Diplomasi Koersif yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



**Gambar 2 : Kerangka Konseptual Diplomasi Koersif Inggris sebagai upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukrania**  
**Sumber : Diolah oleh penulis**

Menurut hemat penulis, Diplomasi Koersif adalah salah satu praktik paling menarik dan umum. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan perspektif dalam Resolusi Konflik yang berlaku dalam sistem politik internasional. Pendekatan ini yang dilakukan Inggris dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Eropa. Atas nama Resolusi KBAonflik demi menciptakan perdamaian, Inggris menerapkan Diplomasi Koersif sebagai instrumen kebijakan luar negerinya.